

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

L K j I P

2019

INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGGAI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2019.

Laporan LkjIP Inspektorat Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan sarana penyajian data dan informasi Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Banggai dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai bentuk penyajian data diupayakan sebaik mungkin, penyusunan Laporan LKjIP Inspektorat diolah dari hasil pelaksanaan atas Program Kinerja Tahunan Tahun 2019 yang sederhana dan bertujuan memudahkan para *stakeholder* dalam mengevaluasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan LKjIP ini dan kami menyadari dengan segala kekurangan, Laporan LKjIP ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar lebih baik dimasa yang akan datang.

Luwuk, 03 Februari 2020

INSPEKTUR,



IMRAN SUNI, SE, M. Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19630822 199112 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Kabupaten Banggai Tahun 2016 s/d 2021 telah menetapkan visinya untuk menjadi katalisator pembaharuan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai dengan misi “*Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju Pemerintahan yang berwibawa*“. Rencana tersebut bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai secara umum dicapai melalui indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai tahun 2016 s/d 2021 .

Secara singkat target laporan ini menyajikan informasi mengenai keselarasan antara pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang bertujuan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Daerah, dimana tingkat keberhasilan diukur dengan 2 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektur dan Bupati Banggai Tahun 2019. Capaian Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagai berikut :

A. Indikator dengan kategori sangat baik (Capaian \geq 100%)

1. Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
6. Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7. Presentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9. Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
10. Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

11. Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12. Presentase Pemulangan Pegawai yang Pensiun
13. Persentase Pendidikan dan Pelatihan Formal
14. Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15. Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
16. Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
17. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
18. Persentase Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD
19. Presentase Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
20. Presentase Review Kinerja dan Keuangan OPD
21. Persentase Pemantauan Pelaksanaan SPIP
22. Persentase Pendampingan OPD Atas Pemeriksaan BPK
23. Presentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

B. Indikator dengan kategori baik (Capaian 76% sampai 99%)

1. Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2. Presentase Penyediaan Makanan dan Minuman
3. Persentase Peningkatan Kapabilitas APIP
4. Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

C. Indikator dengan kategori cukup (Capaian 56% sampai 75%)

1. Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

D. Indikator dengan kategori kurang (Capaian $\leq 55\%$)

1. Persentase Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Persentase Pemeriksaan Khusus dan Kasus

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Melalui kerja keras dan implementasi metode pengawasan berupa audit, review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya dengan sasaran strategis tersebut tercapainya seluruh strategis pengelolaan pertanggung jawaban kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien.

Hasil capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting digunakan sebagai *feed back* dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang, agar sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Banggai dalam melaksanakan pelayanan publik dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja.....	31
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini, tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	33
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dalam RPJMD	34
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	36
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan	38
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	39
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	40
B. Realisasi anggaran Tahun 2019	43
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	11
Tabel 3A.1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	14
Tabel 3A.2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14
Tabel 3A.3	Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	15
Tabel 3A.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15
Tabel 3A.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16
Tabel 3A.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16
Tabel 3A.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	17
Tabel 3A.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	17
Tabel 3A.9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.....	18
Tabel 3A.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	18
Tabel 3A.11	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	19
Tabel 3A.12a	Penyediaan Alat Ukur	19
Tabel 3A.12b	Pengadaan Alat Kantor	20
Tabel 3A.12c	Pengadaan Alat Rumah Tangga	20
Tabel 3A.13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	21
Tabel 3A.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	21
Tabel 3A.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	22
Tabel 3A.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	22
Tabel 3A.17	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	23
Tabel 3A.18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	24
Tabel 3A.19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24
Tabel 3A.20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	25
Tabel 3A.21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	25
Tabel 3A.22	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	26
Tabel 3A.23	Pemutahiran Sistem Informasi Data Base	26
Tabel 3A.24	Peningkatan Kapabilitas APIP	26

Tabel 3A.25	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	27
Tabel 3A.26	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	28
Tabel 3A.27	Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD	28
Tabel 3A.28	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	29
Tabel 3A.29	Review Kinerja dan Keuangan OPD	29
Tabel 3A.30	Pemantauan Pelaksanaan SPIP	30
Tabel 3A.31	Pendampingan OPD atas Pemeriksaan BPK	30
Tabel 3A.32	Pemeriksaan Khusus dan Kasus	31
Tabel 3A.33	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	31
Tabel 3A.34	Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya	33
Tabel 3A.35	Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah (Restra 2016-2021)	35
Tabel 3A.36	Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Standar Nasional	37
Tabel 3A.37	Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta Peningkatan/Penurunan Kinerja atas Alternatif	38
Tabel 3A.38	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
Tabel 3A.39	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	42
Tabel 3B.1	Realisasi Program Berdasarkan Anggaran pada Inspektorat Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019	43



BAB I

PENDAHULUAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah**, Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- Merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
- Menyusun laporan hasil pengawasan.
- Melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten.
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pemerintahan Desa, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu melakukan pengawasan yang profesional dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

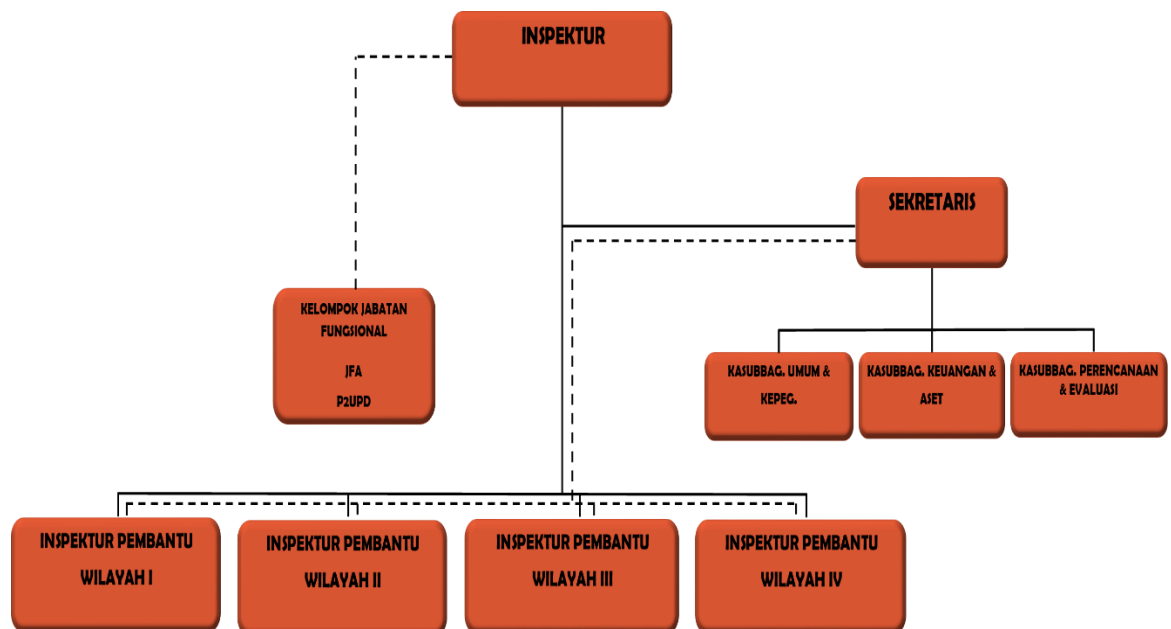
Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;



- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD;

Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai:



Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai

Adapun uraian tugas masing-masing jabatan struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

- a) Inspektur mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Inspektorat berdasarkan kebijakan umum Daerah dan ketentuan yang berlaku.
 2. Menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan.



3. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Inspektur Pembantu sesuai ketentuan dan rencana kerja.
5. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Melaksanakan perumusan program dan kebijakan pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
7. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penilaian pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian terhadap obyek pemeriksaan, penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada setiap organisasi perangkat Daerah serta pemantauan, pemuktahiran dan pelaporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Bupati Banggai berdasarkan pedoman/ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan review atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Inspektur pembantu dilingkup tugasnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Inspektur Pembantu sesuai program kerja.
11. Melaporkan pelaksanaan tugas Inspektorat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian target/kinerja.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



- b) Sekretaris mempunyai tugas:
1. Merencanakan program operasional Inspektorat berdasarkan rencana strategis Inspektorat dan ketentuan yang berlaku.
 2. Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan rencana kerja.
 3. Mengatur pelaksanaan tugas kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
 4. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional kesekretariatan sesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku.
 5. Melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja.
 6. Melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku.
 7. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan capaian kinerja.
 9. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku.
 10. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat sesuai pencapaian/target kinerja.
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



- c) Inspektur Pembantu mempunyai tugas:
1. Merencanakan program operasional pengawasan di wilayah kerjanya berdasarkan rencana strategis Inspektorat dan ketentuan yang berlaku.
 2. Membagi tugas kepada bawahan Inspektur Pembantu Wilayah berdasarkan rencana kerja.
 3. Mengatur pelaksanaan tugas kepada bawahan Inspektur Pembantu Wilayah sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
 4. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup Inspektur Pembantu Wilayah sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku.
 5. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Inspektur pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Melaksanakan, mengusulkan dan mengkoordinasikan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya dan melaksanakan koordinasi dengan bawahan untuk kerjasama dan saling mendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
 7. Melaksanakan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
 8. Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier sesuai ketentuan yang berlaku.
 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan Inspektur Pembantu Wilayah berdasarkan capaian kinerja.
 10. Menyelia pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Melaporkan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah sesuai pencapaian/target kinerja.
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- d) Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas:
1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program operasional Sekretariat.



2. Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja.
3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi.
4. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian sesuai hasil analisis data ketentuan yang berlaku.
5. Melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat Dinas, pengurusan rumah tangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah Dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, TASPEN, BPJS, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan pengelolaan organisasi, kepegawaian dan tatalaksana Dinas, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta sistem pengendalian internal inspektorat, berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai pencapaian/target kinerja.



12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan program operasional Sekretariat.
2. Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja.
3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi.
4. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan dan evaluasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku.
5. Melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran kedinasan sesuai dengan ketentuan dan indikator kinerja.
7. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat DPRD, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan Sekretariat Inspektorat sesuai ketentuanyang berlaku.
9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



11. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi sesuai pencapaian/target kinerja.
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- f) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan program operasional sekretariat.
 2. Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja.
 3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan tugas dan fungsi.
 4. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi keuangan dan aset sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku.
 5. Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan/perubahan pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA) berdasarkan pagu yang ditetapkan.
 6. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman dan realisasi pengelolaan keuangan Daerah.
 7. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan perlengkapan/aset berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 8. Melaksanakan pemeliharaan peralatan/perlengkapan, lingkungan dan gedung kantor, kendaraan Dinas serta aset lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 10. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan ketentuan.



11. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai pencapaian/target kinerja.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sumber daya merupakan faktor utama yang mendukung tugas dan fungsi Inspektorat. Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat. Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai sampai dengan akhir Desember 2019 berjumlah 50 orang.

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana operasional pemeriksa tidak mendukung.
- Kesulitan review dokumen perencanaan karena format dokumen tidak seragam pada masing-masing SKPD.
- Temuan yang berulang (seperti barang Daerah, pengadaan barang/jasa dan lain-lain).
- Rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh SKPD.
- Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi.
- Kesenjangan antara bimtek dan kebutuhan.

Adapun isu strategis yang perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan untuk mewujudkannya yakni :

1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan dari SKPD.
2. Belum optimalnya pelaksanaan dan akuntabilitas APBD.
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD.
4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD.
5. Kurangnya Pengawasan Melekat (WASKAT) pada masing-masing Objek Pemeriksaan (OBRIK) guna meminimalisir pengaduan masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banggai dan sesuai RPJMD 2016-2021 serta rencana kerja tahunan dalam program kegiatan pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Tahun 2019.

Visi dan Misi Kabupaten Banggai merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Periode 2016-2021.

A. Visi

“ Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan kemaritiman berbasis kearifan lokal dan budaya “

B. Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa.
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi.
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah.
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan budaya.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Daerah.

Adapun perjanjian kinerja Inspektorat Daerah merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang menggambarkan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Banggai mencakup sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang dilaksanakan pada Tahun 2019 didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah sebagai berikut yang disajikan dalam tabel 2.1.



Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	IKU	NON IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	75%	√	
		Persentase penurunan temuan	25%	√	
		Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	80%	√	
		Level kapabilitas APIP	Level 3	√	
2.	Meningkatnya tata kelola APIP yang baik, bersih, akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja	A		√
		Persentase peningkatan disiplin ASN	100%		√



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Banggai dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran dan indikator yakni :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Daerah, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Persentase SAKIP OPD dengan nilai minimal A.
 - b. Level maturitas penerapan SPIP.
 - c. Persentase penurunan temuan materil.
 - d. Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti.
2. Meningkatnya tata kelola Inspektorat yang baik, bersih, akuntabel dan profesional, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Level kapabilitas APIP.
 - b. Nilai akuntabilitas kinerja.
 - c. Presentase peningkatan disiplin ASN.



Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Perhitungan presentase pencapaian rencana tingkat kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam dua kondisi :

- a. Semakin Tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin Tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran tersebut dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| 1. $\geq 100\%$ | = | Sangat Baik (A) |
| 2. 76 % sampai 99% | = | Baik (B) |
| 3. 56 % sampai 75 % | = | Cukup (C) |
| 4. Kurang dari 55 % | = | Kurang (K) |

Untuk menilai capaian realisasi kegiatan kinerja pada Tahun anggaran 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai diuraikan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperlancar program pelayanan administrasi perkantoran Inspektorat Daerah. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100%. Output kegiatan terdiri dari target 1.100 lembar.



Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target ini dengan adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3A.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya Benda-benda pos	1100 lembar	1100 lembar	100

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa telepon, internet, listrik dan air untuk kebutuhan perkantoran Inspektorat Daerah. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 77.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.960.000,- atau 100%. Output kegiatan terdiri dari target 4 jaringan/paket. Seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3A.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya jasa telepon, internet, listrik dan air	4 jaringan/paket	4 jaringan/paket	100

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 8.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.033.300,- atau 59%. Output kegiatan ini terdiri dari 13 STNK mobil dan motor dari target 20 STNK mobil dan 2 STNK motor. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Uraian tersebut dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 3A.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	22 STNK Mobil dan Motor	13 STNK Mobil dan Motor	59

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa kebersihan kantor serta pengadaan alat dan bahan pembersih. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 50.690.975,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.819.475,- atau 70,66%. Capaian indikator kinerja tersedianya jasa kebersihan dan bahan pembersih terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Output kegiatan ini terdiri dari 2 orang jasa kebersihan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Seperti pada Tabel 3A.4.

Tabel 3A.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah jasa kebersihan kantor	2 orang	2 orang	100

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan alat tulis kantor. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp.41.345.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.284.000,- atau 99,85%. Capaian indikator kinerja tersedianya alat tulis kantor terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Output kegiatan ini terdiri dari 15 jenis alat tulis kantor. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen



untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Uraian tersebut tertera pada tabel berikut.

Tabel 3A.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya alat tulis kantor	15 jenis	15 jenis	100

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan barang cetak dan penggandaan. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 11.178.125,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.432.000,- atau 66,48%. Capaian indikator tersedianya barang cetak dan penggandaan terealisasi 66% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja disebabkan oleh :

1. Adanya penurunan belanja cetak sebesar 28,82% dari target 100 %
2. Adanya penurunan belanja penggandaan sebesar 50,84% dari target 100%
3. Adanya penurunan belanja penjiilidan sebesar 48,14% dari target 100%

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3A.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya barang cetak dan penggandaan	4433 Jenis	2940 Jenis	66

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan koran. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- dengan



realisasi sebesar Rp. 1.320.000,- atau 73,33%. Penyediaan bahan bacaan ini adalah belanja langganan koran setiap bulan.

Capaian indikator kinerja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 54% dari target 240 eksemplar terealisasi 131 eksemplar. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Seperti tabel berikut.

Tabel 3A.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	100

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan makanan dan minuman rapat. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 30.016.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.655.000,- atau 88,80%. Capaian indikator kinerja tersedianya makanan dan minuman rapat terealisasi 70% dari target 1011 dos terealisasi 712 dos, hal ini disebabkan adanya penurunan frekuensi rapat. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Seperti tabel 3A.8.

Tabel 3A.8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya makanan dan minuman rapat	1011 Dos	897 Dos	88

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan biaya perjalanan Dinas luar Daerah. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 277.456.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 276.752.028,- atau 99,74%.



Capaian indikator kinerja tersedianya biaya perjalanan Dinas luar Daerah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 26 Ls. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Dapat dilihat pada tabel 3A.9.

Tabel 3A.9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	26 kali	26 kali	100

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan biaya perjalanan Dinas dalam Daerah. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 144.145.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.101.080,- atau 46,55%. Capaian indikator kinerja tersedianya biaya perjalanan Dinas dalam Daerah terealisasi 43% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 80 kali terealisasi 35 kali. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan dapat dilihat pada tabel 3A.10.

Tabel 3A.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	80 kali	35 kali	43

11. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan honorarium pegawai honorer tiap bulan. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 190.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 162.550.000,- atau 85,19%. Capaian indikator kinerja tersedianya pegawai honorer 80% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 10 orang terealisasi



8 orang. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3A.11 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya pegawai honorer	10 orang	8 orang	80

12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Program pengadaan perlengkapan gedung kantor terdiri dari 3 kegiatan, yaitu Pengadaan alat ukur, pengadaan alat kantor dan pengadaan alat rumah tangga. Berikut uraian capaian kinerja masing-masing kegiatan dalam program ini.

a. Pengadaan Alat Ukur

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan alat ukur, seperti alat ukur tinggi otomatis, alat ukur 100 m, alat tes mutu beton/hammer test dan sigma. Adapun anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 37.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.859.040,- atau 47,75%.

Capaian indikator kinerja tersedianya alat ukur terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 20 unit alat ukur. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor dan disampaikan melalui tabel 3A.12a.

Tabel 3A.12a Pengadaan Alat Ukur

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya alat ukur	20 unit	20 unit	100

b. Pengadaan Alat Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan alat kantor seperti mesin potong rumput. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini



berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 2.570.575,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau 97,25%. Pengadaan alat kantor yang diadakan terdiri dari mesin potong rumput 1 (satu) unit.

Capaian indikator kinerja tersedianya perlengkapan gedung kantor terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor. Seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3A.12b Pengadaan Alat Kantor

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya alat kantor	1 Unit	1 Unit	100

c. Pengadaan Alat Rumah Tangga

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan alat rumah tangga. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 9.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000,- atau 100%. Pengadaan alat rumah tangga terdiri dari pengadaan alat pendingin (AC) 2 (dua) unit.

Capaian indikator kinerja tersedianya alat rumah tangga terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor dan dapat dilihat pada tabel 3A.12c.

Tabel 3A.12c Pengadaan Alat Rumah Tangga

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya alat rumah tangga	2 Unit	2 Unit	100



13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan peralatan gedung kantor guna melancarkan kegiatan di Inspektorat. Adapun anggaran yang disediakan sebesar Rp. 102.826.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 101.537.500,-.

Pengadaan peralatan gedung kantor terdiri dari pengadaan laptop 2 (dua) unit, pengadaan printer 5 (lima) unit dan pengadaan scanner 1 (satu) unit.

Capaian indikator kinerja jumlah pengadaan peralatan gedung kantor terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 8 unit. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3A.13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya peralatan gedung kantor	8 Unit	8 Unit	100

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 39.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.422.651,- atau 82,08%. Capaian indikator kinerja terpeliharanya kendaraan dinas/operasional terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 16 unit kendaraan dinas. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor. Seperti tabel 3A.14.

Tabel 3A.14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	16 unit	16 unit	100



15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.265.000,- atau 54,41%. Capaian indikator kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantorterealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 13 unit AC. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3A.15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (AC)	13 unit	13 unit	100

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 11.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.015.000,- atau 76,72%. Capaian indikator kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 14 unit laptop dan 10 unit printer. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3A.16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terpeliharanya peralatan gedung kantor			100
Laptop	14 unit	14 unit	
Printer	10 unit	10 unit	



17. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan pegawai yang pensiun. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 28.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.044.800,- atau 89,44%. Pemulangan Pegawai yang Pensiun diadakan untuk pegawai yang pensiun dari target 7 orang terelalisasi sebanyak 7 orang, sehingga capaian indikator kinerja tersedianya pembiayaan pemulangan pegawai yang pensiun adalah 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan disiplin aparatur. Terlihat pada tabel 3A.17.

Tabel 3A.17 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya pembiayaan pemulangan pegawai yang pensiun	7 Orang	7 Orang	100

18. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pendidikan dan pelatihan formal untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 130.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 128.159.500,- atau 98,58%.

Capaian indikator kinerja terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Jumlah ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal ini berjumlah 7 orang sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 7 orang. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3A.18 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	7 Orang	7 Orang	100

19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan kinerja Inspektorat. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 5.094.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.584.500,- atau 70,36%. Capaian indikator kinerja tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terealisasi 100% dari target 3 laporan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk pemenuhan pelaporan capaian kinerja seperti tabel 3A.19.

Tabel 3A.19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	100

20. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan semesteran. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 5.631.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.957.900,- atau 88,03%. Capaian indikator kinerja tersedianya laporan keuangan semesteran terealisasi 100% dari target 2 laporan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk



memenuhi pelaporan keuangan semesteran. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3A.20 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya laporan keuangan Semesteran	2 laporan	2 laporan	100

21. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 5.631.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.983.100,- atau 88,48%. Capaian indikator kinerja tersedianya laporan keuangan akhir tahun terrealisasi 100% dari target 1 dokumen sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk memenuhi pelaporan keuangan akhir tahun. Seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3A.21 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	100

22. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan RENJA, RENSTRA, RKA, DPA, RKPA dan DPPA. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 10.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.915.800,- atau 68,06%. Capaian indikator kinerja tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran terrealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 6 dokumen. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk memenuhi dokumen perencanaan dan anggaran. Seperti pada tabel 3A.22.



Tabel 3A.22 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya RENJA, RENSTRA, RKA, DPA, RKPA dan DPPA	6 dokumen	6 dokumen	100

23. Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base

Untuk kegiatan pemutakhiran sistem informasi data base telah di relokasi ke kegiatan lainnya, dikarenakan masih ada kegiatan yang lebih membutuhkan dan juga Website Inspektorat sudah ada dengan kondisi yang baik tanpa ada masalah. Pada tabel di bawah ini.

Tabel 3A.23 Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya pembiayaan Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base	0 Website	0 Website	Direlokasi

24. Peningkatan Kapabilitas APIP

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama adalah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 470.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 429.546.178,- atau 91,39%. Capaian indikator kinerja jumlah APIP yang mengikuti diklat internal dan diklat substantif adalah 80 orang dari target 81 orang. Capaian indikator terealisasi 98% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah komitmen APIP dalam mengikuti diklat. Seperti tabel 3A.24.

Tabel 3A.24 Peningkatan Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya diklat internal dan diklat substantif	81 Orang	80 Orang	98



25. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pengawasan pada semua perangkat daerah secara berkala, dalam kegiatan ini menghasilkan 160 laporan dari target 186 laporan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 1.445.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.245.080.755,- atau 86,15%. Capaian indikator kinerja terealisasi 86% dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah komitmen pengawas dalam melakukan kegiatan pengawasan di perangkat daerah. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3A.25 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya laporan hasil pengawasan internal	186 laporan	190 laporan	102

26. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 690.770.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 612.720.696,- atau 88,70%. Capaian indikator kinerja terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan terealisasi 88% (582 rekomendasi) dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 654 rekomendasi. Output kegiatan ini adalah Laporan Hasil Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan yang terdiri dari:

- a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Dana BOS SMP se-Kabupaten Banggai
- b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan OPD se-Kabupaten Banggai
- c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus APBDesa/OPD se-Kabupaten Banggai.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk mendorong penyelesaian temuan hasil pengawasan dan komitmen



untuk peningkatan sistem pengawasan internal. Sedangkan faktor penghambat adalah masih terdapat obyek pemeriksaan yang kurang maksimal dalam melakukan penyelesaian temuan hasil pengawasan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3A.26 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya kegiatan tindak lanjut	654 rekomendasi	582 rekomendasi	88

27. Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi kinerja dan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dana yang disediakan Rp. 208.345.000,- dengan realisasi Rp. 186.520.200,- atau 89,52%

Capaian indikator kinerja terlaksananya evaluasi kinerja dan keuangan OPD adalah 3 laporan dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Adapun indikator telah terlaksananya kegiatan adalah sebesar 100 %, faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen dalam penyelesaian 3 laporan. Seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3A.27 Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja dan keuangan OPD	3 laporan	3 laporan	100

28. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk Koordinasi, monitoring dan evaluasi sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 51.812.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.681.500,- atau 76,58%. Capaian indikator kinerja terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi terealisasi 100 %, yaitu 12 laporan. Faktor pendukung keberhasilan



pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah. Dapat dilihat pada tabel 3A.28.

Tabel 3A.28 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	12 Laporan	12 Laporan	100

29. Review Kinerja dan Keuangan OPD

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah Daerah. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 178.451.000 dengan realisasi sebesar Rp. 112.357.100,- atau 62,96%. Capaian indikator kinerja terlaksananya review LKPD terealisasi 418% (46 laporan) dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 11 laporan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah. Dapat dilihat pada tabel 3A.29.

Tabel 3A.29 Review Kinerja dan Keuangan OPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya review LKPD	11 laporan	46 laporan	418

30. Pemantauan Pelaksanaan SPIP

Kegiatan ini bertujuan untuk Pemantauan Pelaksanaan SPIP. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 85.709.650,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.018.600,- atau 99,19%. Capaian indikator kinerja terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan SPIP terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 1 laporan. Faktor pendukung



keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah. Seperti tabel berikut.

Tabel 3A.30 Pemantauan Pelaksanaan SPIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan SPIP	1 laporan	1 laporan	100

31. Pendampingan OPD Atas Pemeriksaan BPK

Kegiatan ini bertujuan untuk Pendampingan Pemeriksaan BPK. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 10.442.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.421.000,- atau 99,79%. Capaian indikator kinerja terlaksananya Pendampingan Pemeriksaan BPK terealisasi 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 10 OPD. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya komitmen untuk peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah. Dapat dilihat pada tabel 3A.31.

Tabel 3A.31 Pendampingan OPD Atas Pemeriksaan BPK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya pendampingan pemeriksaan BPK	10 OPD	10 OPD	100

32. Pemeriksaan Khusus dan Kasus

Kegiatan ini bertujuan untuk pemeriksaan khusus dan kasus. Dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan ini berdasarkan DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp. 339.635.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 294.723.237,- atau 86,81%. Capaian indikator kinerja terlaksananya pemeriksaan khusus dan kasus terealisasi 53% (8 kasus) dari



target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu 15 kasus. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3A.32 Pemeriksaan Khusus dan Kasus

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya pemeriksaan khusus dan kasus	15 Kasus	8 Kasus	53

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2019 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini yang terdiri dari 1 sasaran dan 4 Indikator dengan target dan realisasi terlihat seperti tabel berikut.

Tabel 3A.33 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	100%	36%
		Persentase penurunan temuan	25%	19,40%
		Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	85%	72,55%
		Level Kapabilitas APIP	3	2+

Persentase pencapaian indikator kinerja utama untuk tahun 2019 sebagai berikut :

1. Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A masih 36%
2. Persentase pencapaian penurunan temuan = 19,40% dari target 25% (pencapaian > 25%)



3. Persentase hasil pemeriksaan APIP/BPK yang ditindaklanjuti = 72,55%
dari target 85%.
4. Level Kapabilitas APIP = level 2+ dari target level 3



2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai yang terdiri dari 2 sasaran dan 6 Indikator Sasaran dengan target dan realisasi terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3A.34 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Tahun 2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2019			2018			2017		
		Target	Realisasi	Presentase Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Presentase Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Presentase Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	100%	36%	36%	80%	100%	125%	70%	100%	142%
	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan	25%	19,40%	77%	20%	28,25%	141,25%	17%	0%	Temuan material tidak menurun
	Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	85%	72,55%	85%	80%	45,17%	56,66%	75%	63%	84%
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	2+	83%	75%	71,59%	95,45%	75%	76%	101,33%
Meningkatnya tata kelola inspektorat yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja	A	A	100%	BB	-	-	C	-	-
	Persentase peningkatan disiplin ASN	90%	90%	100%	90%	-	-	80%	-	-

Dari tabel tersebut dapat dikatakan adanya kemajuan setiap tahun dari tahun 2017 – 2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai A dari target 100 % mendapatkan realisasi 36 %
2. Persentase penurunan temuan hasil pengawasan dengan target 25 % mendapatkan realisasi 19,40 %
3. Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti dengan target 85 % mendapatkan realisasi 72,55 %
4. Level kapabilitas APIP 2+ yang dimana masih kurang dari target 3
5. Nilai akuntabilitas kinerja dengan realisasi nilai A
6. Persentase peningkatan disiplin ASN dengan realisasi 90 %

Dalam pelaksanaannya Kinerja Inspektur dapat dikatakan berhasil, di karenakan secara keseluruhan tren persentase capaian hampir 100%. Hanya saja ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target sesuai harapan.

3. Realisasi Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Banggai yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Adapun realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3A.35 Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2016-2021)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2019			Target Renstra 2016-2021			
		Target	Realisasi	Presentase Tingkat Capaian	2017	2018	2020	2021
1	2	3	4	5	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	100%	36%	36%	70%	80%	100%	100%
	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan	25%	19,40%	77%	17%	20%	30%	40%
	Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	85%	72,55%	85%	75%	80%	90%	95%
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	2+	83%	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
Meningkatnya tata kelola Inspektorat yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	100%	C	BB	A	A
	Persentase Peningkatan disiplin ASN	90%	90%	100%	80%	90%	100%	100%



Dari tabel 3A.3 dapat disimpulkan bahwa capaian target dari tahun 2017 – 2019 terjadi peningkatan pada indikator kinerja :

1. Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A
2. Persentase penurunan temuan hasil pengawasan
3. Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti
4. Level Kapabilitas APIP
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja
6. Persentase Peningkatan disiplin ASN

Dengan adanya kenaikan target sejak tahun 2017 – 2019 menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Banggai yang semakin baik.

4. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap standar nasional yang mana, Inspektorat Kabupaten Banggai mengacu pada **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah** mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. *Olehnya itu tidak mengacu pada standar nasional yang ada, seperti terlihat pada tabel berikut ini.*



Tabel 3A.36 Realisasi Kinerja Tahun 2019 Terhadap Standar Nasional

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2019			Standar Nasional		
		Target	Realisasi	Presentase Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Presentase Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	100%	36%	36%	-	-	-
	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan	25%	19,40%	77%	-	-	-
	Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	85%	72,55%	85%	-	-	-
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	2+	83%	-	-	-
Meningkatnya tata kelola Inspektorat yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	100%	-	-	-
	Persentase Peningkatan disiplin ASN	90%	90%	100%	-	-	-



5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Serta Alternatif Yang Dilakukan

Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai 2019 telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan indikator program sasaran kerja

Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai tahun 2019 seperti diuraikan dalam tabel 3A.37.

Tabel3A.37 Analisis keberhasilan/Kegagalan serta Peningkatan/Penurunan Kinerja Atas Alternatif

Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian Analisis	Alternatif Solusi
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	Keberhasilan kelancaran proses penyiapan penyusunan tugas administrasi bagian kesekretariatan wajib didukung dengan pengembangan kompetensi masing-masing sub bagian kesekretariatan	Bimtek dengan Diklat Sub tantif
	Penurunan hasil temuan	Berkurangnya hasil temuan dikarenakan adanya kesadaran dari obyek pemeriksa terkait dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan tertib, kemudian adanya efek jera kepada obyek pemeriksa yang terkendala masalah hukum.	Intensifnya inspektorat dalam melakukan clinic konsultasi mobile
	Hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	Kurang kooperatifnya obyek pemeriksa dalam penyelesaian hasil tindak lanjut	Dilakukannya sosialisasi tentang akibat dari kelalaian dalam hal pemeriksaan
	Level kapabilitas APIP	Masih kurangnya jumlah auditor pemeriksa, sehingga menghambat kinerja dalam hal	Ketatnya pengawasan Inspektorat dalam mengawasi kegiatan



		ketepatan pemeriksaan.	di setiap perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola Inspektorat yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai akuntabilitas	Akuntabilitas kinerja di Inspektorat semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari semakin baiknya kinerja ASN Inspektorat di lingkup pemerintahan.	Diberikannya pelatihan dalam hal pertanggung jawaban pelaporan
	Peningkatan disiplin ASN	Keberhasilan dalam peningkatan disiplin ASN dipengaruhi oleh kesadaran ASN yang semakin meningkat	Diberikannya sosialisasi mengenai disiplin kerja ASN Diberikan efek jera kepada ASN yang melanggar kedisiplinan

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2019 didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Daerah.

6. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai hasil efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan realisasi kinerja dengan pencapaian target kinerja sasaran yang telah dilaksanakan dan dapat dilihat pada tabel 3A.38.

Tabel 3A.38 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja			Program
		Target	Realisasi	Presentase Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	100%	36%	36%	1. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH) 2. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH)
	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan	25%	19,40	77%	
	Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	85%	72,55%	85%	



	Level kapabilitas APIP	Level 3	2+	83%	3. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH)
Meningkatnya tata kelola Inspektorat yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	100%	4. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
	Persentase Peningkatan disiplin ASN	90%	90%	100%	5. Pelayanan administrasi perkantoran
					6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
					7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
					8. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
					9. Pengembangan sistem informasi / data
					10. Fasilitasi pindah / purna tugas PNS
	Rata – Rata Capaian			100%	
Tingkat Efisiensi 38,75%					
Tingkat Efektifitas 163,26%					

7. Analisis Program Kegiatan Penunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan ini disebabkan 4 indikator sasaran dalam Indikator Kinerja Utama bisa mencapai target bahkan lebih dari target sedangkan 3 indikator sasaran IKU tidak mencapai target disebabkan beberapa hal antara lain :

- a. Masih kurangnya frekuensi kegiatan tindak lanjut hasil temuan;
- b. Masih kurangnya kesadaran Obrik dalam menyelesaikan tindak lanjut temuannya;
- c. Kurangnya dukungan pengelolaan kualitas pengawasan.



Indikator pembandingan di Tahun 2019 bahwa adanya peningkatan kinerja pada indikator sasaran yaitu Persentase SAKIP OPD dengan nilai minimal B dan Level Maturitas Penerapan SPIP dan diuraikan pada tabel 3A.39.



Tabel 3A.39 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	2019			2018		
		Target	Realisasi	Presentase Tingkat Capaian	Target	Realisasi	Presentase Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	100%	36%	36%	80%	100%	125%
	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan	25%	19,40%	77%	20%	28,25%	141,25%
	Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	85%	72,55%	85%	80%	45,17%	56,66%
	Level kapabilitas APIP	3	2+	83%			
Meningkatnya tata kelola Inspektorat yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	-	-	-
	Persentase Peningkatan disiplin ASN	-	-	-	-	-	-



B. REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

Anggaran Inspektorat Kabupaten Banggai Tahun 2019 seluruhnya sebesar Rp.11.450.286.005,- yang terbagi menjadi :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | Rp. 6.736.524.080,- |
| - Belanja Pegawai | Rp. 6.736.524.080,- |
| 2. Belanja Langsung | Rp. 4.713.761.925,- |
| - Belanja Pegawai | Rp. 190.800.000,- |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp. 4.365.185.350,- |
| - Belanja Modal | Rp. 154.896.575,- |

Untuk program kegiatan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 3B.1.

Tabel 3B.1 Realisasi Program berdasarkan Anggaran pada Inspektorat Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Perkantoran	Rp. 839.892.600,00	Rp. 692.647.837,00	82,47%
2.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 209.046.575,00	Rp. 175.599.191,00	84,00%
3.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Rp. 28.000.000,00	Rp. 25.044.800,00	89,45%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 130.000.000,00	Rp. 128.159.500,00	98,58%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 26.517.250,00	Rp. 20.441.300,00	77,08%
6.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 470.000.000,00	Rp. 429.546.178,00	91,39%
7.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	Rp. 3.010.305.500,00	Rp. 2.586.523.088,00	85,92%
	JUMLAH	Rp. 4.713.761.925,00	Rp. 4.057.461.894,00	86,07%



Dengan hasil rincian anggaran tersebut terlihat secara keseluruhan program dan kegiatan tidak terealisasi, sepenuhnya dikarenakan beberapa sebab yakni.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dimana anggaran yang disediakan melebihi. Sementara untuk pembayaran jasa tersebut didasari pada jumlah pemakaian sehingga terdapat sisa anggaran dari target Rp. 77.960.000 terealisasi Rp. 62.700.954
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terjadi efisiensi biaya dalam penyesuaian kebutuhan dari target Rp. 11.178.125 terealisasi Rp. 7.432.000
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. dikarenakan anggaran yang disediakan melebihi dari kebutuhan, sehingga terjadi efisiensi pembayaran dari target Rp. 1.800.000 terealisasi Rp. 1.320.000
 - d. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas tidak tercapai dikarenakan adanya pengurangan biaya pembayaran pajak (STNK) dari target sebesar Rp. 8.500.000 terealisasi Rp. 5.033.300
 - e. Jasa Kebersihan Kantor ditargetkan 2 orang, namun pada 3 bulan tahun pertama petugas kebersihan hanya 1 orang dari target Rp. 50.690.975 terealisasi Rp. 35.819.475
 - f. Penyediaan makanan dan minuman terjadi penurunan kegiatan dalam rapat-rapat, sehingga anggarannya tidak terealisasi sepenuhnya dari target Rp. 30.016.000 terealisasi Rp. 26.655.000.
 - g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan target Rp. 277.456.100. dimana capaian yang direalisasikan sebesar Rp. 276.752.028, hal ini disebabkan target perjalanan tidak dapat dipastikan banyaknya personil yang mengikuti pada kegiatan tersebut.
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah tidak terealisasi disebabkan padatnya kegiatan teknis dan kegiatan tambahan, sehingga



kegiatan yang bersifat umum tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Dari target sebesar Rp. 144.145.900 terealisasi Rp. 67.101.080

- i. Penyediaan Jasa Administasi Perkantoran dari target awal pegawai honorer non K2 sebanyak 6 orang, namun yang terealisasi hanya 4 orang, sehingga target Rp. 839.892.600 terealisasi Rp. 692.647.837.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, terjadi efisiensi harga dari pengadaan alat ukur dan alat tes mutu beton dari target Rp. 37.400.000 yang terealisasi sebesar Rp. 17.859.040.
 - b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, terjadi efisiensi harga dari pengadaan laptop, printer, scanner target Rp. 102.826.000 terealisasi Rp. 101.537.500
 - c. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, terjadi efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan dari target Rp. 39.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 32.422.651
 - d. Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Gedung Kantor, terjadi efisiensi biaya jasa service AC dan alat potong rumput dari target Rp. 6.000.000 yang terealisasi Rp. 3.326.500
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, terjadi efisiensi biaya jasa service laptop dan printer dari target Rp. 11.750.000 yang terealisasi Rp. 9.015.000
 3. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
 - a. Pemulangan pegawai yang pensiun, terjadi efisien pembayaran gaji pokok pensiun dari anggaran Rp. 28.000.000 terealisasi Rp. 25.044.800
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal, disebabkan efisiensi biaya mengikuti diklat/pelatihan dari target Rp. 130.000.000 terealisasi Rp. 128.159.500



5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dikarenakan efisiensi biaya selisih bayar dari target Rp. 5.094.250 terealisasi Rp. 3.584.500
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dikarenakan efisiensi biaya selisih bayar dari target Rp. 5.631.500 terealisasi Rp. 4.957.900
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dikarenakan efisiensi biaya selisih bayar dari target Rp. 5.631.500 terealisasi Rp. 4.983.100
 - d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Dalam penyusunan laporan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD yang semula ditargetkan Rp. 10.160.000 dan terealisasi Rp. 6.915.800, hal ini disebabkan kegiatan dan pelaporan diawal tahun tidak dilaksanakan akibat terlambatnya pengesahan RKA.
6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - a. Peningkatan Kapabilitas APIP, kegiatan tersebut tidak dapat diikuti dikarenakan banyaknya kegiatan tambahan, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat disertakan. Adapun rencana target sebesar Rp. 470.000.000 dan realisasinya Rp. 429.546.178
7. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PKPT disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang waktunya saling berdekatan, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana. Dimana capaian targetnya Rp. 1.445.140.000, dan realisasi kegiatan tersebut hanya mencapai Rp. 1.245.080.755
 - b. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Kegiatan ini tidak sepenuhnya terlaksana dikarenakan banyaknya kegiatan diluar rutinitas, sehingga kalender dari perencanaan PKPT tidak dapat



disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Adapun target dari capaian adalah Rp. 690.770.000 dimana realisasinya sebesar Rp. 612.720.696

- c. Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD, Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Review Kinerja dan Keuangan OPD

Kegiatan evaluasi kinerja dan keuangan disetiap OPD telah dilaksanakan, namun waktu yang tidak memungkinkan sehingga target dari capaian evaluasi tersebut sebagian tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk kegiatan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD dari target sebesar Rp. 208.345.000 terhadap realisasi yang dicapai sebesar Rp. 186.520.200 dan untuk kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi target Rp. 51.812.000 yang terealisasi Rp. 39.681.500, sedangkan target kegiatan Review Kinerja dan keuangan OPD Rp. 178.451.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 112.357.100

- d. Pemantauan Pelaksanaan SPIP

Pada kegiatan Pemantauan Pelaksanaan SPIP terjadi efisiensi harga dari belanja ATK, Dekorasi, belanja Penggandaan, Belanja sewa ruang rapat dan belanja makan minum lembur serta Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Target kegiatan pemantauan Pelaksanaan SPIP sebesar Rp. 85.709.650 dan terealisasi Rp. 85.018.600

- e. Pendampingan OPD atas Pemeriksaan BPK

Terjadi efisiensi harga pada Belanja Alat Tulis Kantor dalam kegiatan Pendampingan OPD atas pemeriksaan BPK dari target Rp. 339.635.750 terealisasi Rp. 294.723.237.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, disetiap perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan kinerja instansi pemerintah LKjIP Inspektorat Kabupaten Banggai merupakan salah satu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Pada LKjIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja tahun 2019 dan dilengkapi dengan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Utama terlihat bahwa Inspektorat Kabupaten Banggai berupaya se-optimal mungkin agar target kinerja dapat tercapai atau terealisasi sesuai dengan harapan, dimana anggaran yang dialokasikan pada Inspektorat disetiap tahunnya telah dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana penunjang.

Adapun realisasi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai pada Tahun 2019 mencapai persentase 86,64%. Dimana capaian tersebut masuk dalam skala pengukuran ordinal dengan kategori nilai B (baik) dimana berada pada rentang antara 76 % sampai 100%.

B. SARAN

Dalam rangka peningkatan peran dan kapabilitas Inspektorat yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan, maka saran yang disampaikan kepada pemangku kepentingan *stakeholder* yakni sebagai berikut :



1. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dilingkungan Inspektorat perlu terus diupayakan keterlibatan dan peran aktif serta proaktif disetiap komponen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai sebagai kesatuan yang integral dengan mengacu kepada *three lines of defense* yang dalam sistem pengawasan internal bahwa pertahanan pertama berada pada unit kerja masing-masing, pertahanan kedua penggunaan sistem pengendalian internal dan pertahanan ketiga berada di Inspektorat.
2. Perlu peningkatan kapabilitas dan kompetensi serta jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan jumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dengan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan.
3. Adanya peningkatan beban tugas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai berupa tugas-tugas tambahan dan khusus, sehingga menimbulkan konsekuensi alokasi anggaran yang lebih memadai demi efektifitasnya kinerja inspektorat serta penambahan sarana pendukung kegiatan pengawasan.

Capaian kinerja inspektorat yang telah dituangkan dalam LKJIP tahun 2019 ini, diharapkan dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja inspektorat.

Luwuk, 03 Februari 2020
Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai
Inspektur,

IMRAN SUNI, SE, M.Si

NIP. 19630822 199112 1 001